

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Agensi

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976. Jensen memaparkan bahwa relasi keagenan terbentuk apabila *principal* memperkerjakan *agent* untuk menyediakan suatu layanan dan kemudian mendelegasikan otoritas dalam pengambilan keputusan.³⁷ Teori agensi menerangkan bahwa setiap subjek termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, yang mengakibatkan konflik antara *agent* dan *principal*.

Menurut M.C Jensen dan Meckling dalam Sri Anugrah Natalina mengemukakan bahwa teori keagenan dijadikan dasar teori dari sebuah praktik bisnis perusahaan yang menjelaskan hubungan kerja sama (kontrak keagenan) pada *principal* dan *agent*.³⁸ Sehingga kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu penentu pencapaian tata kelola yang baik dan efisien.³⁹

Teori agensi merujuk pada masalah dalam hubungan kerja antara *principal* dan *agent* yang muncul sebab dua hal: pertama, kendala informasi didapatkan *principal* dari manajemen. Kedua, adanya ketidaksamaan

³⁷ Rahima Br Purba, *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akutansi*, Jurnal Ilmu Pendidikan, vol. 7 (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2023).

³⁸ Sri Anugrah Natalina, "Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure Coal Mining Companies In Indonesia During the Health Crisis," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 2 (2022): 261–579, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/272>.

³⁹ Achmad Hidir, Arif Zunaidi, and Petrus Jacob Pattiasina, "Understanding Human Resources Management Strategy in Implementing Good Government Practice : What Research Evidence Say" 7, no. 3 (2021): 265–273, <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1658>.

pandangan ataupun respon antara *principal* dan *agent* terhadap risiko, hal tersebut dikemukakan oleh Eisenhardt dalam Lesmono dan Siregar.⁴⁰

Menurut Astria teori keagenan mengacu pada hubungan antara dua entitas yaitu *principal* dan *agent* yang merupakan manajer kedua. Teori ini juga menyebutkan bahwa apabila terjadi pemisahan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* yang menjalankan perusahaan, maka akan terjadi perselisihan keagenan karena masing-masing perusahaan akan selalu berupaya memaksimalkan kegunaannya.⁴¹

Ross dalam penelitian Cahyani, Putri, Naka, dan Lestari menyatakan bahwa saat seseorang diberi penunjukan sebagai perwakilan untuk pihak lain yang menjadi pemegang saham di suatu perusahaan.⁴² Menurut Ibrahim dalam Cahyaningtyas dan Abbas, teori keagenan memaparkan bahwa ketidakselarasan tujuan antara *agent* dan *principal* mampu diperkecil melalui prosedur pengendalian yang dapat menyeimbangkan beragam tujuan yang terdapat di entitas bisnis. Prosedur pengendalian dalam teori keagenan ini dapat dilakukan dengan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik.⁴³ Di mana dalam penelitian ini dinilai berdasarkan proporsi dewan komisaris independen dan jumlah kepemilikan saham manajerial.

⁴⁰ Bambang Lesmono and Saparuddin Siregar, "Studi Literatur Tentang Agency Theory," *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 2 (2021): 203–210, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>.

⁴¹ Purba, *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akuntansi*, vol. 7, p. .

⁴² Aning Dwi Cahyani et al., "Literature Review: Implementasi Etika Bisnis Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 76–88, <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.316>.

⁴³ Rhika Cahyaningtyas and Dirvi Surya Abbas, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2022): 230–235, <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/5264>.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam konteks bisnis. Teori ini menekankan bahwa setiap pihak memiliki ambisi dan motivasi yang berbeda dan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan transparansi dan pengungkapan informasi yang akurat dari manajemen kepada investor sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, teori agensi menjadi dasar penting dalam memahami dinamika hubungan kerja antara pemegang saham dan manajemen dalam perusahaan.

B. Integritas Laporan Keuangan

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, mendefinisikan laporan keuangan sebagai informasi yang menggambarkan kinerja, posisi, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Integritas laporan keuangan berarti informasi tersebut disajikan secara jujur dan tanpa rekayasa, mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan.⁴⁴ *Statement of Financial Accounting (SFAC)* Nomor 2, integritas dalam pelaporan keuangan mengacu pada informasi yang disajikan secara objektif dan tidak memihak.⁴⁵

⁴⁴ Fri Sella Afriani, "Analysis of the Implementation of PSAK 01 Regarding the Presentation of Financial Reports at the Sherlina Oriflame Agent Marpoyan Pekanbaru," *Nexus Synergy: A Business Perspective*, no. 3 (2023): 109–137, <https://doi.org/10.61230/nexus.v1i3.55>.

⁴⁵ Ni Komang Ayu Anggraeni, Putu Kepramareni, and Made Edy Septian Santosa, "Integritas Laporan Keuangan Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 6, no. 1 (2024): 90–111, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/9062>.

Menurut Saad dan Abdillah dalam Putri, Gustati, dan Andriani, integritas laporan keuangan berarti ukuran dan tujuan sebuah perusahaan dalam mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak penting melalui laporan keuangan.⁴⁶

Menurut Indrasari dalam Anggraeni, Kempramareni, dan Santosa integritas laporan keuangan mengarah pada laporan keuangan yang apabila dianalisis memperlihatkan dua ciri kualitatif laporan keuangan yaitu relevan dan andal.⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan mengacu pada penyajian informasi yang menggambarkan kinerja, posisi, dan arus kas perusahaan secara jujur, objektif, relevan, dan andal. Ini memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

1. Formula integritas laporan keuangan

Integritas laporan keuangan dapat dilihat dari berbagai indikator. Dalam penelitian ini integritas laporan keuangan dilihat melalui *Quality of Earnings Ratio*. Rasio ini memperlihatkan pada ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik laba yang dilaporkan oleh

⁴⁶ Megawati Nawara Putri, Gustati, and Wiwik Andriani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)," *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)* 1, no. 1 (2022): 8–14, <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.6>.

⁴⁷ Anggraeni, Kepramareni, and Santosa, "Integritas Laporan Keuangan Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)."

perusahaan mencerminkan kinerja keuangan yang sebenarnya.⁴⁸ Jika dikaitkan dengan teori agensi oleh Jensen dan Meckling, rasio ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, yang menjadi dasar bagi pengembangan rasio ini.

Keunggulan rasio ini dalam mengukur integritas laporan keuangan digambarkan dengan laba yang berkualitas lebih relevan dan andal dalam mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan, sehingga menampilkan kondisi yang akurat terhadap pemegang saham. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih ukuran dari integritas laporan keuangan menggunakan *Quality of Earnings Ratio*. Berikut adalah rumus *Quality of Earnings Ratio*.

$$\text{Quality of Earnings Ratio} = \frac{\text{Operating Cash flow}}{\text{Net Income}}$$

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Winarti, Pane, dan Dewi yang mengemukakan bahwa:⁴⁹

1. Jika hasil rasio kualitas laba >1.0 artinya kualitas laba tinggi.
2. Jika hasil rasio kualitas laba <1.0 artinya kualitas laba rendah.

⁴⁸ Gading Tio Yuniar and Sari Andayani, "Pengaruh Investment Opportunity Set Dan Profitability Terhadap Earnings Quality," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2024): 4306–4315, <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2378>.

⁴⁹ Ayu Winarti, Aditya Amanda Pane, and Sucitra Dewi, "Pertumbuhan Laba Dan Struktur Modal Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 3 (August 13, 2024): 474–488, <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.199>.

C. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dikembangkan pada tahun 1992 oleh Sir Adrian Cadbury yang merupakan pimpinan *Cadbury Commite* dengan sebutan Kode Praktik Terbaik *Cadbury* yang dikenalkan untuk merevolusi tata kelola perusahaan di Inggris.⁵⁰ Menurut Sir Adrian Cadbury dalam penelitian yang dilakukan Aryana, Owais, Dahiyat, AL Rahamneh, Saraireh, Abu Hajja, dan Al-Hawary⁵¹, *GCG* mengacu pada kondisi keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial perusahaan dan masyarakat.

Mengacu pada *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mengartikan *GCG* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.⁵²

Menurut Anggraeni, Jolekhah, dan Neliana, *GCG* dapat diartikan sebagai prosedur regulasi yang menghubungkan antara kepentingan untuk menghasilkan nilai tambah demi kepentingan bersama.⁵³

⁵⁰ Brian R. Cheffins and Bobby V. Reddy, "Thirty Years and Done—Time to Abolish the UK Corporate Governance Code," *Journal of Corporate Law Studies* 22, no. 2 (2022): 709–748, <https://doi.org/10.1080/14735970.2022.2140496>.

⁵¹ Laith Abdallah Aryan et al., "The Effectiveness of Corporate Governance on Corporate Social Responsibilities Performance and Financial Reporting Quality in Saudi Arabia's Manufacturing Sector," *Uncertain Supply Chain Management* 10, no. 4 (2022): 1141–1146, <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2022.8.013>.

⁵² Binus University, "Good Corporate Governance (GCG) Dan Pedoman Etika Dalam Perusahaan," *Binus University School of Accounting*, 2020, accessed November 2, 2024, <https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaan/>.

⁵³ Dwi Anggraeni, Siti Jolekhah, and Tri Neliana, "Profitability and Leverage , on Firm Value with Good Corporate Governance as Moderation," *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science* 04, no. 03 (2024): 1658–1670, <https://ajmesc.com/index.php/ajmesc/article/view/966>.

Prinsip-prinsip *GCG* yang dijadikan tolok ukur yurisdiksi, kunci stabilitas keuangan, standar sistem keuangan yang baik, dan memberikan dasar penelitian komponen *GCG* tentang ketaatan terhadap standar adalah *transparency, accountability, responbility, independency, dan fairness*.⁵⁴

Jadi jika disimpulkan, *GCG* merujuk pada kerangka aturan yang memastikan keseimbangan antara tujuan ekonomi perusahaan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. *GCG* mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan tujuan menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu, *GCG* berperan sebagai acuan yurisdiksi, penjamin stabilitas keuangan, serta standar untuk sistem keuangan yang berkualitas. Salah satu faktor tata kelola perusahaan yang diambil dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial.

D. Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 33/PJOK//04./2014, mengutarakan bahwa dewan komisaris independen berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung.⁵⁵ Pada UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 108 Ayat 5 juga dipaparkan bahwa perusahaan yang telah berjalan dalam

⁵⁴ Surifah and Ifah Rofiqoh, *Corporate Governance - Badan Usaha Milik Negara, Universitas Teknologi Yogyakarta*, 2nd ed. (Makassar: Graha Aksara Makassar, 2020).

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik," n.d., accessed November 2, 2024, https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK_33_Direksi_dan_Dewan_Komisaris_Emiten_Atau_Perusahaan_Publik.pdf.

pengumpulan dan pengelolaan dana masyarakat, termasuk perusahaan menerbitkan surat utang kepada public atau perusahaan terbuka, diharuskan setidaknya dua anggota dewan komisaris, minimal 30% harus terdiri dari dewan komisaris independen, yang mana satu di antaranya harus di tunjuk sebagai presiden dewan komisaris.⁵⁶ Berikut rumus yang digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi dewan komisaris independen:

$$DKI = \sum \text{Komisaris Independen} / \sum \text{Dewan Komisaris}$$

E. Kepemilikan Manajerial

Menurut Borolla pada Reysa, Fitroh, Wibowo, Rustansi, kepemilikan manajerial diartikan pada jumlah proporsi saham terbesar yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, yang diukur berdasarkan persentase total saham yang dimiliki oleh manajemen tersebut.⁵⁷

Noorica dan Asalam⁵⁸, Sudana dalam Septanta⁵⁹ mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki manajemen yang secara aktif terlibat dalam alur pengambilan keputusan entitas bisnis.

⁵⁶ OJK, “UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” (Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan, n.d.), accessed November 3, 2024, https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5_UU-40-2007_PERSEROAN_TERBATAS.pdf.

⁵⁷ Riris Reysa et al., “Determinasi Kebijakan Dividen Dan Kinerja Perusahaan: Kepemilikan Manajerial Dan Kinerja Keuangan (Literature Review Manajemen Keuangan),” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): 364–374, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.881>.

⁵⁸ Famela Noorica and Ardan Gani Asalam, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance,” *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2021): 2021, <http://dx.doi.org/10.31000/competitive.v5i2.5041>.

⁵⁹ Rananda Septanta, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak,” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 6, no. 1 (2023): 95–104, <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>.

Damayanti dalam Sari dan Wulandari mengatakan bahwa kepemilikan manajerial merujuk pada kondisi manajer yang memiliki dua kedudukan pada perusahaan: sebagai pelaksana operasional dan sebagai pemilik saham, karena mereka ikut serta dalam struktur modal perusahaan.⁶⁰

Kepemilikan saham manajerial pada perusahaan memiliki beberapa tingkatan.⁶¹ Adapun fungsi dan tingkatan kepemilikan manajerial.

Tabel 2.1. Tingkat dan Level Kepemilikan Manajerial

Level Kepemilikan	Persentase Saham	Implikasi Umum
Low	0% sampai 5%	Integritas Meningkat
Intermediate	5% sampai 25%	Integritas Menurun
High	diatas 25%	Integritas Meningkat

⁶⁰ Dita Meilana Sari and Putu Prima Wulandari, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Akuntansi* 22, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.21776/tema.22.1.1-18>.

⁶¹ Eny Maryanti and Wiwiek Dianawati, "Ownership Structure and Performance: How Does Business Environmental Uncertainty Matter?," *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396540>.

Secara ringkas, kepemilikan manajerial berarti ketika manajer memiliki saham perusahaan sehingga dapat ikut berperan pada pengambilan keputusan. Sehingga, semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen, semakin tinggi insentif mereka untuk bekerja demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Berikut rumus dalam mengukur kepemilikan manajerial:

$$KM = \sum \text{Saham Manajerial} / \sum \text{Saham Beredar}$$